

KATA PENGANTAR

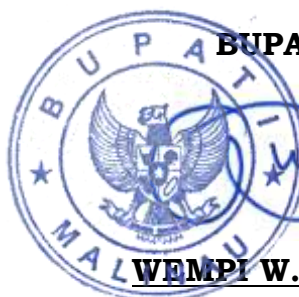
Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga Perjanjian Kinerja dapat di selesaikan dengan baik.

Laporan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparan dan kinerja aparatur seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja tahun 2024 disusun berdasarkan pada dokumen perencanaan yang terkait dengan rencana strategis daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Demikian akhirnya Perjanjian Kinerja Tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malinau, 29 Januari 2024

 **BUPATI MALINAU**
WEMPI W. MAWA, SE., M.H



BUPATI MALINAU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WEMPI W. MAWA, SE., M.H

Jabatan : BUPATI MALINAU

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Malinau, 29 Januari 2024

 **BUPATI MALINAU**

WEMPI W. MAWA, SE., M.H

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	72,16
2	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,97
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran perkapita (Ribu Rupiah)	10.450,00
4	Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram dan Harmonis Serta Bebas Bencana	Angka Kriminalitas (%)	0.45
		Indeks Resiko Bencana (Poin)	124,4
5	Meningkatnya Kesenjangan Gender	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	85,36
6	Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama (Poin)	81,7
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)	80,5
7	Meningkatnya produktifitas sektor-sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB (%)	4,92
8	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB (%)	2,80
		Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)	1,85
9	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro Yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas (%)	74
		Persentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil (%)	76,60
10	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Poin)	76,52
11	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,09
12	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah (Rp Milyar)	92.000.000.000
13	Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)	54,80
		Persentase Pemukiman Yang Layak (%)	80
		Rasio Rumah Layak Huni (Rasio)	1:1,068

		Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi (%)	75
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	77
		Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi (%)	32,46
14	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisolasian Daerah	Persentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi (%)	98,17
15	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)	100
		Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)	53,85
		Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)	91,47
16	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	69,15
		Nilai LPPD	2,960
17	Terselenggaranya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Dari KKN	Opini BPK	WTP
18	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	6
19	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	88
20	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (%)	17,74

	PROGRAM		ANGGARAN
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	107.722.425.263
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	2.137.288.550
	Program sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp	250.401.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	553.641.000
	Program pengendalian Penduduk	Rp	12.000.000
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	687.000.000
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	550.300.000
2	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat		
	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	140.416.243.969
	Program Pengembangan Kurikulum	Rp	2.091.867.300
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	6.346.290.483
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat		
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	862.464.000
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	73.543.000
4	Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram dan Harmonis Serta Bebas Bencana		
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	3.848.461.324
	Program Penanggulangan Bencana	Rp	2.654.692.796
	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	480.168.300

5	Meningkatnya Kesenjangan Gender	
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 100.000.000
	Program Perlindungan Perempuan	Rp 1.547.364.700
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 200.000.000
6	Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter dan Budaya Masyarakat	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 28.935.000.000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 650.000.000
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 609.983.000
7	Meningkatnya Produktifitas Sektor-Sektor Ekonomi Primer Berorientasi Pada Potensi dan Karakteristik Lokal	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 26.650.243.900
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 26.650.243.900
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 499.970.400
	Program Penyuluh Pertanian	Rp 349.874.400
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 349.998.850
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 2.058.759.000
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 525.000.000
8	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi dan Karakteristik Wilayah	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 2.637.179.850
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 1.914,029.250

	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	2.637.179.850
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	7.165.097.100
	Program Pemasaran Pariwisata	Rp	1.687.532.850
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp	337.470.625
	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	494.198.700
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	249.997.500
	Program Pembinaan Sejarah	Rp	150.779.100
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp	2.555.698.250
9	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro yang Berkualitas		
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	1.084.875.000
	Program Pengembangan UMKM	Rp	2.950.487.000
10	Meningkatnya Ketahanan Pangan		
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	582.401.835
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	124.928.500
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	70.571.500
11	Menurunnya Angka Pengangguran		
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	7.565.033.115
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	925.000.000
	Program Hubungan Industrial	Rp	550.220.735
	Program Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Rp	244.612.500
12	Meningkatnya Investasi daerah		
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	194.005.250

13 Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan

Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	364.912.424.000
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Rp	40.786.952.841
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	4.635.475.012
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	9.302.610.000
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	83.022.769.030
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	2.147.987.600
Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	120.078.895.000
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	3.943.355.000
Program Pengembangan Perumahan	Rp	350.000.000
Program Kawasan Permukiman	Rp	3.371.777.000

14 Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisolasian Daerah

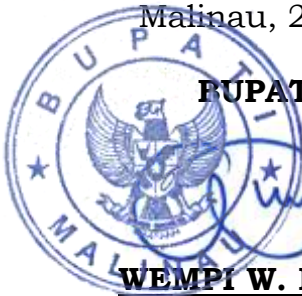
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	249.999.500
Program Aplikasi Informatika	Rp	3.351.771.501

15 Meningkatnya Kualitas Lahan, Air dan Udara

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	23.492.816.826
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp	112.776.650
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	9.095.518.398
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	2.465.318.400
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp	308.243.000
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	99.916.200

16	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	6.128.612.500
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	1.491.131.000
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	574.880.000
17	Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN		
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	4.572.230.000
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	481.994.076.148
18	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah		
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	5.445.795.500
19	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	366.435.499
20	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa		
	Program Penataan Desa	Rp	225.488.300
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	3.714.002.920

Malinau, 29 Januari 2024



RUPATI MALINAU

WEMPI W. MAWA, SE., M.H